



KASEK BISA DIMUTASI

PPDB Rawan Terjadi Pungli

YOGYA (KR) - Pungutan liar (pungli) beberapa kali terjadi di dunia pendidikan. Biasanya pungli terjadi saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sekolah yang terbukti melakukan pungutan kepada wali murid akan ditindak tegas oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan Inspektur Inspektorat DIY Wiyos Santoso kepada wartawan belum lama ini. Menurutnya, sekolah yang kedapatan melakukan pungli dilakukan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Seperti kepala sekolah dimutasikan atau dibebastugaskan sebagai jabatan kepala sekolah. "Dua tahun belakangan ini memang ada pungli di sekolah tingkat SMA. Ketentuan dari pemerintah tidak ada pungutan yang dilakukan karena biaya operasional sekolah su-

dah ditanggung dana BOS. Tapi faktanya ada juga sekolah yang meminta pungutan yang tidak sesuai ketentuan," terang Wiyos kepada KR baru-baru ini.

Wiyos menerangkan, pungutan kepada wali murid diperbolehkan jika memang ada program sekolah yang tidak ditanggung dana BOS. Misalnya mau menambah fasilitas AC di kelas atau komite sekolah yang mengadakan karya wisata. "Hal ini diperbolehkan asal tidak ada paksaan dan tidak ada sanksi bagi siswa yang tidak

mengikuti karya wisata," ungkap Wiyos.

Wiyos berharap pada PPDB tahun depan tidak ada lagi pungli yang dilakukan pihak sekolah. Ia menegaskan, pihaknya sangat terbuka terhadap laporan adanya pungli. Identitas pengadu pun akan dijamin kerahasiaannya. Pengaduan ini, lanjut Wiyos, akan ditindaklanjuti jika ada nama pengirim dan alamatnya. Menurutnya, penerusan akan lebih enak jika ada kuitansi yang disimpan pengadu. "Saya harap tidak

ada pungli lagi. Kalau tidak ada bukti (pungli), orangtua tidak mau menunjukkan, kami juga tidak bisa menuntut. Jika pihak sekolah meminta sumbangan dan menyebutkan nominalnya itu berarti sudah pemaksaan dan bisa diadakan," pungkasnya.

Kepala Sekolah SMPN 6 Yogya Titik Sugiyarti menegaskan, pihaknya tidak akan meminta sumbangan kepada wali murid. Pasalnya dana BOSDA sebesar Rp 1.750.000 dinilai sudah cukup. "Kalau sekolah-sekokah di lingkup Kota Yogya saya rasa tidak berani meminta bantuan atau sumbangan karena BOSDanya juga sudah cukup," imbuh Titik. (Aha)-g

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005